Profil Data Berbasis Gender

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan profil data berbasis gender yang komprehensif untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Bengkayang. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis kondisi kesetaraan gender saat ini di tiga sektor inti yang menjadi tanggung jawab dinas—kepemudaan, olahraga, dan pariwisata—dengan menggunakan data dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) "Kabupaten Bengkayang Dalam Angka", Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2021-2026, serta laporan dan penelitian relevan lainnya.

Temuan kunci dari analisis ini mengidentifikasi sebuah paradoks yang signifikan: di satu sisi, Kabupaten Bengkayang menunjukkan indikator pemberdayaan gender makro yang kuat, seperti Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tinggi dan menempati peringkat kedua di Kalimantan Barat. Namun, di sisi lain, kerangka kerja operasional dan akuntabilitas utama di tingkat Disporapar pada dasarnya bersifat "buta gender" (*gender-blind*). Hal ini terbukti dari ketiadaan data terpilah gender secara absolut dalam dokumen pertanggungjawaban resmi, seperti Laporan Kinerja (LKj) tahunan. Akibatnya, mustahil untuk melakukan evaluasi yang akurat mengenai pemerataan manfaat dan partisipasi dalam program-program pengembangan kepemudaan dan pembinaan olahraga. Sebaliknya, sektor pariwisata menunjukkan adanya partisipasi organik yang tinggi dari perempuan, yang secara *de facto* menjadi tulang punggung layanan ekowisata di tingkat komunitas. Meskipun demikian, mereka menghadapi berbagai hambatan struktural terkait keterampilan, akses sumber daya, dan teknologi yang belum secara sistematis ditangani oleh program-program yang ada.

Rekomendasi utama yang diajukan dalam laporan ini adalah agar Disporapar segera menginstitutionalisasi pendekatan yang responsif gender dalam keseluruhan siklus programnya. Langkah fundamental yang paling mendesak adalah mewajibkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk semua kegiatan. Langkah dasar ini krusial untuk memungkinkan perancangan intervensi yang tepat sasaran, memastikan distribusi sumber daya yang adil, dan pada akhirnya membuka potensi penuh seluruh warga—baik laki-laki maupun perempuan—dalam pembangunan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata di Kabupaten Bengkayang.

Bagian 1: Lanskap Demografi, Sosial-Ekonomi, dan Kebijakan Gender di Kabupaten Bengkayang

Bagian ini bertujuan untuk membangun konteks fundamental dengan memaparkan data makro dari BPS dan RPJMD. Analisis ini melukiskan gambaran lanskap gender di Kabupaten Bengkayang, yang menjadi arena operasional bagi Disporapar dalam menjalankan program-programnya. Pemahaman mendalam terhadap kondisi demografis, sosial-ekonomi, dan kerangka kebijakan yang ada merupakan prasyarat untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan program dinas.

1.1 Profil Demografi Berbasis Gender

Struktur demografi suatu wilayah adalah titik awal dari setiap perencanaan pembangunan yang inklusif. Publikasi resmi seperti "Kabupaten Bengkayang Dalam Angka" yang dirilis setiap tahun oleh BPS Kabupaten Bengkayang merupakan sumber data primer untuk memahami komposisi penduduk. Analisis terhadap struktur populasi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menjadi vital untuk mengidentifikasi demografi target dari program-program Disporapar.

Secara khusus, data mengenai jumlah pemuda—yang menurut definisi Undang-Undang Kepemudaan berada dalam rentang usia 16-30 tahun—menjadi krusial. Mengetahui proporsi pemuda laki-laki dan perempuan dalam populasi total memungkinkan Disporapar untuk merancang alokasi sumber daya yang proporsional dan relevan. Sebagai contoh, sebuah kohor pemuda yang besar secara kuantitatif akan menjadi justifikasi kuat untuk peningkatan investasi pada program kepemudaan dan fasilitas olahraga. Lebih jauh lagi, pemahaman mengenai rasio jenis kelamin di dalam kohor ini adalah langkah pertama yang esensial untuk memastikan bahwa desain program tidak secara inheren bias dan dapat diakses secara setara oleh pemuda laki-laki dan perempuan. Tanpa data dasar ini, perencanaan program berisiko menjadi tidak tepat sasaran dan gagal menjangkau segmen populasi yang seharusnya dilayani.

1.2 Indikator Kesejahteraan dan Partisipasi Gender

Kondisi kesejahteraan dan tingkat partisipasi ekonomi memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai realitas kesetaraan gender di lapangan. Data dari RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026 menyoroti beberapa kesenjangan yang persisten antara laki-laki dan perempuan dalam ranah ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pada tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tercatat sebesar 63,29%. Angka ini secara signifikan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 87,24%. Selisih sebesar 23,95 poin persentase ini mengindikasikan bahwa laki-laki secara dominan masih dipandang dan berfungsi sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga, sementara partisipasi perempuan dalam pasar kerja formal masih terbatas. Kesenjangan ini mencerminkan adanya hambatan struktural maupun kultural yang mungkin membatasi akses perempuan terhadap peluang kerja.

Lebih lanjut, data mengenai kewirausahaan perempuan juga menunjukkan tantangan serupa. Dari total 53.789 perempuan yang bekerja pada tahun 2020, hanya 13,5% yang berstatus sebagai wiraswasta. Jumlah perempuan yang memiliki usaha dan mampu mempekerjakan buruh tetap maupun tidak tetap juga relatif kecil, yaitu hanya 22,2%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja masih perlu dioptimalkan. Hal ini menjadi konteks penting bagi program-program Disporapar, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan pemuda.

Di sisi pendidikan, analisis terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan jenis kelamin dari data BPS menjadi indikator penting lainnya. Meskipun data spesifik tidak tersedia dalam materi yang dianalisis, indikator ini sangat fundamental untuk memahami fondasi modal manusia dari populasi pemuda yang menjadi sasaran program Disporapar. Tingkat partisipasi sekolah yang setara antara laki-laki dan perempuan di berbagai jenjang pendidikan akan menjadi landasan bagi partisipasi yang setara di bidang lainnya di kemudian hari.

1.3 Kerangka Kebijakan dan Indikator Pemberdayaan

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menetapkan kerangka kebijakan yang secara eksplisit mengakui pentingnya pemberdayaan gender, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Disporapar, dalam merumuskan program pembangunan.

Salah satu capaian yang paling menonjol adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bengkayang. Data menunjukkan tren yang sangat positif dan tergolong tinggi, dengan peningkatan signifikan dari 61,55 pada tahun 2016 menjadi 71,96 pada tahun 2020. Capaian ini menempatkan Bengkayang pada peringkat kedua dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dan bahkan melampaui rata-rata IDG provinsi. IDG yang tinggi secara umum mengindikasikan bahwa kesenjangan gender dalam pembangunan manusia relatif kecil.

Namun, capaian agregat ini perlu dianalisis secara lebih kritis ketika disandingkan dengan indikator lainnya. Fenomena ini dapat disebut sebagai "Paradoks IDG Bengkayang". Meskipun IDG tinggi, representasi politik perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah. Hanya 6 dari 30 kursi DPRD (20%) yang diduduki oleh perempuan, jauh di bawah ambang batas keterwakilan 30%. Sebaliknya, partisipasi perempuan di sektor birokrasi menunjukkan gambaran yang berbeda. Pada tahun 2020, 51,9% dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bengkayang adalah perempuan, dengan mayoritas memiliki tingkat pendidikan tinggi.

Kontradiksi antara IDG yang tinggi dengan TPAK dan representasi politik yang rendah menunjukkan bahwa kemajuan pemberdayaan perempuan tidak merata di semua sektor. Tingginya IDG kemungkinan besar didorong oleh capaian positif di bidang pendidikan dan partisipasi perempuan di sektor publik (PNS), namun hal ini berpotensi menutupi kesenjangan yang masih mengakar di ranah ekonomi dan politik. Selain itu, RPJMD juga mengakui masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa

perempuan dan anak, yang mengindikasikan bahwa tantangan sosial yang lebih dalam masih ada. Konteks ini sangat penting bagi Disporapar, karena mengingatkan bahwa asumsi kesetaraan gender yang didasarkan pada satu indikator agregat bisa jadi keliru dan program-program perlu dirancang untuk mengatasi kesenjangan yang spesifik dan nyata.

Tabel 1: Indikator Kunci Pembangunan Gender di Kabupaten Bengkayang (2019-2020)

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total/Gabungan	Sumber
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2020	87,24%	63,29%	-	RPJMD 2021-2026
Persentase Partisipasi di Lembaga Pemerintah (PNS) 2020	48,10%	51,90%	4.145 orang	RPJMD 2021-2026
Representasi di DPRD	-	20,00% (6 dari 30 kursi)	30 kursi	RPJMD 2021-2026
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2020	-	-	71,96	RPJMD 2021-2026

Tabel di atas secara visual merangkum "Paradoks IDG" tersebut. Dengan menempatkan data TPAK, partisipasi PNS, dan representasi DPRD secara berdampingan, terlihat jelas adanya diskrepansi. Hal ini memberikan landasan berbasis bukti yang kuat untuk analisis sektoral berikutnya, yang akan menguji sejauh mana program Disporapar merespons kesenjangan-kesenjangan fundamental ini.

Bagian 2: Analisis Gender Sektor Kepemudaan

Sektor kepemudaan merupakan salah satu pilar utama tugas dan fungsi Disporapar. Program-program di bidang ini dirancang untuk membentuk karakter, meningkatkan kapasitas, dan membuka peluang bagi generasi muda Bengkayang. Namun, efektivitas program-program ini dalam mendorong kesetaraan gender sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan terpilah. Bagian ini akan menganalisis program kepemudaan Disporapar melalui lensa gender, dengan menyoroti dampak mendalam dari kesenjangan data yang ada.

2.1 Tinjauan Program Kepemudaan Disporapar

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022, Disporapar Kabupaten Bengkayang mengelola "Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan". Program ini didukung dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp 450 juta, dengan realisasi mencapai Rp 448,29 juta atau 99,62%. Program ini merupakan instrumen utama pemerintah daerah untuk berinteraksi dan memberdayakan pemuda di seluruh kabupaten.

Kegiatan-kegiatan utama yang dilaksanakan di bawah program ini meliputi tiga pilar strategis :

1. **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda:** Kegiatan ini menyoar tiga kelompok spesifik, yaitu Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader. Fokusnya adalah pada penanaman jiwa kepemimpinan, inovasi, dan kewirausahaan.
2. **Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka):** Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, disiplin, dan kepemimpinan melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat.
3. **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (OKP):** Kegiatan ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan OKP sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kepemudaan.

Secara konseptual, program-program ini memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial dan pendorong kesetaraan gender. Program Wirausaha Muda, misalnya, dapat secara langsung mengatasi kesenjangan TPAK yang telah diidentifikasi pada Bagian 1, sementara program Paskibraka dan pengembangan OKP dapat menjadi wadah untuk mencetak pemimpin-pemimpin masa depan, baik laki-laki maupun perempuan.

2.2 Kesenjangan Data Partisipasi dan Implikasinya: Sebuah Analisis Gender-Blind

Meskipun memiliki potensi yang besar, analisis mendalam terhadap dokumen pertanggungjawaban Disporapar mengungkap sebuah kelemahan fundamental. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022, sebagai dokumen akuntabilitas utama, menyajikan rincian realisasi anggaran dan output kegiatan dengan sangat baik. Namun, laporan tersebut sama sekali

tidak menyajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk setiap program dan kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan. Laporan tersebut mencatat jumlah kegiatan yang terlaksana dan anggaran yang terserap, tetapi tidak memberikan informasi mengenai berapa banyak pemuda laki-laki dan berapa banyak pemuda perempuan yang berpartisipasi, mendapat manfaat, atau bahkan menjadi fasilitator dalam program-program tersebut.

Ketiadaan data ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan merepresentasikan kegagalan sistemik dalam kerangka pemantauan dan evaluasi dinas. Padahal, kerangka ini seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pada pengukuran capaian kinerja yang transparan dan akuntabel. Sebuah implementasi SAKIP yang buta gender tidak akan pernah bisa mengukur kemajuan menuju pembangunan yang adil dan merata. Tanpa data terpilah, Disporapar tidak memiliki alat ukur untuk mengetahui apakah layanannya menjangkau seluruh segmen pemuda secara seimbang.

2.3 Potensi dan Arah Pengembangan Program Kepemudaan yang Responsif Gender

Implikasi dari kesenjangan data ini sangat serius. Mari kita hubungkan kembali dengan data dari Bagian 1. Kesenjangan TPAK yang signifikan antara laki-laki dan perempuan di Bengkulu menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi yang dapat meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. Program "Wirausaha Muda Pemula" yang

diselenggarakan Disporapar adalah alat yang ideal untuk menjawab kebutuhan ini. Namun, tanpa data partisipasi, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang tidak dapat dijawab:

- Apakah program ini berhasil menarik minat pemuda?
- Apakah materi pelatihan yang diberikan (misalnya, jenis usaha, manajemen keuangan, pemasaran) relevan dengan sektor-sektor di mana perempuan memiliki potensi atau minat untuk berkembang?
- Apakah ada hambatan (misalnya, waktu pelaksanaan, lokasi, norma sosial) yang secara tidak sadar menghalangi partisipasi pemuda?

Saat ini, mustahil untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akibatnya, ada risiko nyata bahwa program ini, meskipun dirancang dengan niat baik, justru secara tidak sengaja memperlebar kesenjangan kewirausahaan. Jika program ini secara *default* lebih banyak diikuti oleh pemuda laki-laki karena faktor-faktor yang tidak teridentifikasi, maka program tersebut justru akan memperkuat stereotip laki-laki sebagai aktor ekonomi utama, alih-alih menantanginya.

Demikian pula dengan seleksi Paskibraka. Proses ini seringkali dianggap sebagai jalur prestisius untuk pengembangan kepemimpinan di kalangan pemuda. Tanpa data gender, tidak diketahui apakah ada peluang yang setara bagi pemuda dan pemudi untuk tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga untuk mengambil peran-peran kepemimpinan strategis di dalam kontingen. Ketiadaan data ini mengubah program yang berpotensi memberdayakan menjadi sebuah "kotak hitam" (*black box*), di mana input (anggaran) dan output (kegiatan terlaksana) diketahui, tetapi dampak dan distribusinya terhadap kesetaraan gender sama sekali tidak terlihat.

Bagian 3: Analisis Gender Sektor Olahraga

Sejalan dengan sektor kepemudaan, bidang olahraga merupakan domain penting lainnya yang dikelola oleh Disporapar. Program di sektor ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga, membina atlet berprestasi, dan memperkuat organisasi keolahragaan. Namun, seperti halnya sektor kepemudaan, evaluasi terhadap aspek kesetaraan gender di bidang olahraga terhambat oleh masalah yang sama: ketiadaan data yang sistematis. Bagian ini akan menganalisis program keolahragaan Disporapar dan menunjukkan bagaimana pelaporan yang buta gender menghalangi pencapaian prestasi yang optimal dan inklusif.

3.1 Alokasi Sumber Daya dan Program Pembinaan Prestasi

Berdasarkan LKj Tahun 2022, Disporapar mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk sektor olahraga. Terdapat dua program utama, yaitu "Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan" dengan realisasi anggaran mencapai Rp 2,69 miliar, dan "Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan" dengan realisasi sebesar Rp 325 juta.

Kegiatan-kegiatan kunci di bawah program keolahragaan meliputi :

1. **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah:** Bertujuan untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan menjangkau bibit-bibit atlet potensial.
2. **Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi:** Merupakan program yang berfokus pada pengembangan talenta atlet untuk dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
3. **Pengembangan Organisasi Keolahragaan:** Termasuk di dalamnya adalah penyaluran dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkayang, yang pada tahun 2022 mencapai nilai yang sangat signifikan, yaitu Rp 2,54 miliar.

Alokasi anggaran yang besar, terutama melalui hibah KONI, menunjukkan bahwa pembinaan olahraga prestasi menjadi prioritas utama. Program-program ini secara kolektif membentuk ekosistem pendukung formal dari pemerintah daerah untuk memajukan dunia olahraga di Bengkayang.

3.2 Representasi Gender dalam Keolahragaan: Kesenjangan Data yang Menghambat Prestasi

Meskipun struktur program dan alokasi anggaran telah jelas, dokumen pertanggungjawaban Disporapar kembali menunjukkan kelemahan yang sama seperti pada sektor kepemudaan. LKj Tahun 2022 sama sekali tidak menyediakan data terpilah gender untuk para penerima manfaat dari program-program keolahragaan. Informasi krusial berikut ini tidak tersedia:

- Rasio atlet laki-laki dan perempuan yang menerima dana pembinaan.
- Komposisi gender dari kontingen atlet yang dikirim untuk mengikuti kejuaraan di tingkat daerah maupun provinsi.
- Distribusi gender pada posisi pelatih, wasit, juri, dan pengurus organisasi cabang olahraga yang menerima pendanaan.

Kekosongan data ini membuat mustahil untuk menilai apakah terdapat "kesenjangan partisipasi" (*gender play gap*) dalam olahraga di Bengkayang. Kita tidak dapat mengetahui apakah anak perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap fasilitas, pembinaan, dan kesempatan berkompetisi. Lebih jauh lagi, ketiadaan data ini menghalangi Disporapar untuk melakukan investasi strategis pada cabang-cabang olahraga di mana atlet perempuan menunjukkan potensi tinggi. Sebagai contoh, di tingkat provinsi, atlet renang putri seperti Elsa Anasyia telah berhasil menyumbangkan medali emas untuk Kalimantan Barat. Tanpa pemetaan data prestasi berdasarkan gender di tingkat kabupaten, talenta-talenta serupa di Bengkayang mungkin tidak teridentifikasi dan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang.

3.3 Merumuskan Peta Jalan untuk Kesetaraan Gender dalam Olahraga

Dana hibah kepada KONI sebesar Rp 2,54 miliar merupakan tuas finansial yang sangat kuat. Namun, dari dokumen yang ada, tidak terdapat indikasi bahwa pencairan dana hibah ini disertai dengan persyaratan bagi KONI untuk melaporkan data terpilah gender atau untuk menyusun program yang secara spesifik mendorong kesetaraan. Ini adalah sebuah peluang

besar yang terlewatkan untuk menggunakan mekanisme pendanaan sebagai alat pendorong perubahan kebijakan di tingkat organisasi olahraga.

Model pendanaan saat ini, yang berupa hibah dalam jumlah besar tanpa adanya kriteria akuntabilitas gender yang jelas, berisiko tinggi melanggengkan bias historis dalam dunia olahraga. Secara tradisional, baik di tingkat nasional maupun global, olahraga laki-laki cenderung menerima porsi pendanaan, perhatian media, dan program pengembangan yang lebih besar. Tanpa adanya kebijakan afirmatif atau kriteria yang eksplisit untuk melawan bias ini, sangat mungkin dana hibah tersebut secara tidak proporsional dialokasikan untuk tim putra atau cabang-cabang olahraga yang didominasi laki-laki.

Dengan demikian, mekanisme pendanaan yang diterapkan oleh Disporapar bukanlah sebuah tindakan yang netral. Secara tidak sengaja, kebijakan ini bisa jadi justru aktif memperkuat ketidakseimbangan gender yang sudah ada dalam ekosistem olahraga. Masalahnya bergeser dari sekadar "kurangnya data" menjadi "kebijakan pendanaan yang berpotensi cacat". Tanpa adanya strategi yang disengaja untuk mengembangkan dan mendukung atlet perempuan, Kabupaten Bengkayang berisiko gagal mengidentifikasi dan membina sebagian besar talenta atletiknya, yang pada akhirnya akan membatasi capaian prestasi olahraga kabupaten secara keseluruhan.

Bagian 4: Peran Sentral Perempuan dalam Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berbeda dengan sektor kepemudaan dan olahraga yang ditandai oleh ketiadaan data, sektor pariwisata di Kabupaten Bengkayang justru menonjolkan peran aktif perempuan yang terdokumentasi dengan baik, terutama melalui studi kualitatif. Bagian ini akan menggali lebih dalam peran sentral perempuan dalam mendorong pariwisata berbasis masyarakat, mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi, dan menganalisis kesenjangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan program yang ditawarkan oleh Disporapar.

4.1 Kontribusi Ekonomi Perempuan dalam Ekowisata Lokal (Studi Kasus: Desa Sebente)

Sebuah studi kasus yang dilakukan di Desa Sebente, Kecamatan Teriak, memberikan bukti nyata mengenai peran krusial perempuan dalam operasional destinasi ekowisata Setanga Lestari. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya partisipan, melainkan pilar utama yang menjalankan roda pariwisata di tingkat komunitas. Peran mereka mencakup berbagai aspek vital dari pengalaman wisatawan :

- **Pengelolaan Kuliner:** Perempuan mengelola kantin dan warung makan, menyajikan hidangan lokal yang menjadi bagian dari daya tarik wisata.
- **Administrasi dan Pelayanan:** Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan tiket masuk, melakukan pencatatan administrasi keuangan, dan memberikan informasi kepada pengunjung.

- **Pengelolaan Akomodasi:** Perempuan juga terlibat aktif dalam operasional *homestay*, memastikan kenyamanan wisatawan yang ingin menginap dan merasakan kehidupan pedesaan.

Bagi para perempuan di Desa Sebente, yang mayoritas memiliki pekerjaan utama sebagai petani, pariwisata menawarkan sumber pendapatan tambahan yang sangat penting. Keterlibatan mereka secara langsung berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Studi kasus ini merupakan contoh konkret dari implementasi model Pariwisata Berbasis Masyarakat (

Community Based Tourism), di mana perempuan tampil sebagai aktor utama yang memberikan layanan dan membentuk citra destinasi.

4.2 Tantangan Struktural dan Kultural yang Dihadapi Perempuan

Meskipun kontribusi mereka sangat nyata, perempuan pelaku pariwisata di Desa Sebente menghadapi serangkaian tantangan signifikan yang menghambat potensi mereka untuk berkembang. Tantangan-tantangan ini bersifat struktural dan kultural, mencerminkan kesenjangan yang lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi perempuan :

- **Keterbatasan Pemahaman dan Keterampilan:** Banyak perempuan yang memiliki pemahaman terbatas mengenai manajemen pariwisata modern, standar pelayanan, dan pengembangan produk. Kualitas sumber daya manusia yang ada seringkali belum memadai untuk bersaing.
- **Pola Pikir dan Ketergantungan:** Masih terdapat pola pikir yang belum sepenuhnya terbuka terhadap potensi dan dinamika industri pariwisata. Ketergantungan pada inisiatif pemerintah masih tinggi, sehingga inisiatif dari bawah menjadi rendah.
- **Kesenjangan Teknologi:** Kurangnya pemahaman dan akses terhadap teknologi digital menjadi hambatan besar, terutama untuk kegiatan pemasaran, promosi, dan sistem pemesanan *online*.

Tantangan-tantangan ini tidak hanya terjadi di Desa Sebente. Laporan yang lebih luas mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan di Kalimantan Barat juga menyoroti masalah serupa, seperti kesulitan mengakses modal karena tidak memiliki aset atas nama sendiri, serta kurangnya akses terhadap pendidikan, keterampilan manajerial, dan pelatihan kepemimpinan. Di sektor ekonomi kreatif, meskipun partisipasi perempuan tinggi, mereka tetap membutuhkan dukungan kebijakan untuk keberlanjutan usaha.

4.3 Menghubungkan Program Disporapar dengan Kebutuhan Riil di Lapangan

Disporapar Kabupaten Bengkayang, melalui LKj Tahun 2022, sejatinya memiliki program-program yang secara nama terdengar relevan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Beberapa program yang tercatat antara lain :

- "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata"
- "Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata"

- "Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar"

Namun, terdapat sebuah diskoneksi yang jelas antara program-program yang bersifat generik ini dengan kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh perempuan di lapangan, sebagaimana teridentifikasi dalam studi kasus Desa Sebente. Kebutuhan nyata mereka adalah pelatihan yang sangat praktis dan tepat sasaran, seperti literasi digital untuk memasarkan

homestay di media sosial, manajemen keuangan sederhana untuk usaha kuliner, atau teknik komunikasi dan pelayanan tamu berstandar internasional.

Kegagalan untuk menghubungkan program dengan kebutuhan riil ini merupakan sebuah kesalahan strategis. Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah "meningkatkan kontribusi sektor pariwisata" terhadap perekonomian daerah. Jalan paling langsung untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan pariwisata yang ditawarkan. Mengingat perempuan adalah penyedia layanan utama di banyak destinasi ekowisata lokal, maka investasi yang paling efektif dan efisien adalah investasi pada peningkatan kapasitas mereka. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata bukan hanya agenda kesetaraan gender, melainkan sebuah strategi ekonomi yang paling logis untuk mencapai target pembangunan daerah. Kegagalan untuk melihat dan bertindak berdasarkan hubungan ini berarti Disporapar kehilangan peluang emas untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata.

Tabel 2: Matriks Peran, Tantangan, dan Rekomendasi Program Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pariwisata Bengkayang (Studi Kasus Desa Sebente)

Peran Perempuan Saat Ini	Tantangan yang Dihadapi	Program Disporapar yang Relevan (2022)	Rekomendasi Penyesuaian Program
Pengelolaan Kuliner	Keterbatasan variasi menu, standar higienitas, dan manajemen stok.	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Menambahkan modul pelatihan spesifik: (1) Pengembangan Produk Kuliner Lokal, (2) Manajemen Usaha Makanan & Minuman Skala Kecil, (3) Sertifikasi Higienitas Pangan.
Administrasi & Keuangan	Pencatatan keuangan manual, kesulitan menghitung profitabilitas.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Mengintegrasikan pelatihan: (1) Literasi Keuangan dan Pembukuan Sederhana, (2) Penggunaan aplikasi kasir digital (<i>Point of Sale</i>) sederhana via ponsel.

Pengelolaan Akomodasi (Homestay)	Standar kebersihan dan pelayanan belum terstandarisasi, manajemen pemesanan manual.	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Menyediakan pelatihan tentang: (1) Standar Pelayanan dan Tata Graha (<i>Housekeeping</i>) untuk <i>Homestay</i> , (2) Manajemen Reservasi <i>Online</i> .
Pemasaran & Promosi	Ketergantungan pada promosi dari mulut ke mulut, kesenjangan teknologi digital.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Mengalokasikan sebagian anggaran untuk pelatihan praktis: (1) Pemasaran Digital Melalui Media Sosial (Facebook, Instagram), (2) Teknik Fotografi Produk dengan Ponsel.

Matriks ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan temuan penelitian dengan struktur program Disporapar yang sudah ada. Alih-alih mengusulkan program baru yang mungkin tidak memiliki alokasi anggaran, matriks ini memberikan rekomendasi konkret tentang bagaimana program-program yang ada dapat disesuaikan dan dipertajam agar lebih efektif dalam menjawab kebutuhan nyata perempuan pelaku pariwisata, sehingga membuatnya lebih mudah untuk diimplementasikan oleh para perencana kebijakan.

Bagian 5: Sintesis, Kesenjangan Data Kritis, dan Rekomendasi Strategis

Bagian penutup ini bertujuan untuk mensintesis temuan-temuan kunci dari analisis lintas sektor, menggarisbawahi urgensi mengatasi kesenjangan data sebagai prioritas kelembagaan, dan merumuskan serangkaian rekomendasi strategis yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi ini dirancang untuk membantu Disporapar Kabupaten Bengkayang bertransformasi dari lembaga yang beroperasi secara buta gender menjadi lembaga yang proaktif dalam mendorong kesetaraan dan inklusivitas.

5.1 Sintesis Temuan Lintas Sektor

Analisis yang telah dilakukan mengungkap sebuah gambaran yang kompleks dan paradoksikal. Di tingkat makro, Kabupaten Bengkayang menunjukkan capaian positif dalam pemberdayaan gender, yang tercermin dari IDG yang tinggi. Namun, ketika lensa dipersempit ke tingkat operasional Disporapar, ditemukan praktik kelembagaan yang secara sistematis buta gender.

Terdapat perbedaan mendasar antar sektor:

- **Di Sektor Kepemudaan dan Olahraga:** Masalah utamanya adalah kekosongan data absolut. Ketiadaan data terpilah gender dalam Laporan Kinerja membuat dampak program terhadap kesetaraan gender menjadi tidak terlihat (

invisible). Mustahil untuk mengetahui apakah program-program ini mengurangi atau justru memperburuk kesenjangan yang ada di masyarakat.

- **Di Sektor Pariwisata:** Situasinya berbeda. Data (kualitatif) menunjukkan partisipasi perempuan yang sangat tinggi dan sentral. Namun, partisipasi organik ini tidak diimbangi dengan dukungan kelembagaan yang memadai dan tepat sasaran. Program-program yang ada bersifat generik dan gagal menjawab kebutuhan spesifik perempuan pelaku pariwisata.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan adanya diskoneksi antara komitmen kebijakan pemberdayaan gender di tingkat RPJMD dengan implementasi dan akuntabilitas di tingkat dinas teknis. Disporapar saat ini belum memiliki perangkat untuk mengukur, mengevaluasi, dan mengelola kinerjanya dari perspektif gender.

5.2 Mengatasi Kesenjangan Data sebagai Prioritas Kelembagaan

Akar masalah di sektor kepemudaan dan olahraga—dan sebagian di sektor pariwisata—adalah kegagalan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terpilah gender. Ini bukan sekadar isu teknis, melainkan sebuah kelemahan fundamental dalam tata kelola dan perencanaan. Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib melaporkan kinerja secara transparan dan terukur. Pelaporan yang buta gender secara esensial melanggar prinsip ini karena gagal mengukur capaian kinerja terhadap seluruh segmen populasi.

Tanpa data terpilah, Disporapar beroperasi berdasarkan asumsi, bukan bukti. Dinas tidak dapat membuktikan bahwa anggarannya didistribusikan secara adil, tidak dapat menunjukkan bahwa programnya inklusif, dan yang terpenting, tidak dapat merancang intervensi yang efektif untuk mengatasi kesenjangan gender yang nyata di masyarakat, seperti kesenjangan TPAK. Oleh karena itu, membangun sistem data terpilah gender bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk tata kelola yang baik dan perencanaan pembangunan yang efektif.

5.3 Rekomendasi Kebijakan dan Program

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, berikut adalah empat rekomendasi strategis yang dirancang untuk diimplementasikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang.

Rekomendasi 1: Institusionalisasi Pengumpulan Data Terpilah Gender (Lintas Sektor)

- **Tindakan:** Merevisi seluruh formulir dan templat pelaporan program untuk mewajibkan pengisian kolom data partisipan/penerima manfaat berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki/Perempuan). Kewajiban ini harus berlaku untuk semua tingkatan: (a) pemantauan internal oleh staf dinas, (b) laporan dari organisasi mitra seperti Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan (c) laporan pertanggungjawaban dari penerima dana hibah, terutama KONI.

- **Justifikasi:** Ini adalah langkah fundamental yang menjadi prasyarat bagi semua tindakan responsif gender lainnya. Langkah ini akan mengubah Disporapar dari lembaga yang buta gender menjadi lembaga yang sadar gender (*gender-aware*), yang mampu melihat dan memahami dampak dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Rekomendasi 2: Integrasi Indikator Gender ke dalam Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas (SAKIP)

- **Tindakan:** Memasukkan setidaknya satu Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang spesifik gender ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKj) tahunan Disporapar. Contoh indikator: "Persentase partisipasi perempuan dalam program pelatihan wirausaha muda" atau "Jumlah atlet perempuan yang mendapatkan dana pembinaan prestasi".
- **Justifikasi:** Tindakan ini akan menanamkan isu kesetaraan gender ke dalam struktur akuntabilitas formal dinas. Hal ini akan memastikan bahwa kesetaraan gender menjadi bagian inti dari evaluasi kinerja pimpinan dan staf, bukan lagi sekadar isu tambahan atau opsional.

Rekomendasi 3: Merancang Program Pariwisata yang Berfokus pada Pemberdayaan Perempuan

- **Tindakan:** Mengalokasikan (*earmarking*) sebagian dari anggaran program "Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata" untuk pelatihan yang secara khusus dirancang bagi perempuan, berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi di Desa Sebente. Fokus pelatihan harus mencakup: (1) Pelatihan Literasi Digital dan Pemasaran

Online untuk *homestay* dan produk kuliner; (2) Pelatihan Manajemen Keuangan dan Kewirausahaan Skala Mikro; dan (3) Pengembangan Program Mentorship Kepemimpinan bagi perempuan pengelola Pokdarwis untuk meningkatkan inisiatif dan kemandirian.

- **Justifikasi:** Rekomendasi ini secara langsung menjawab temuan bahwa memberdayakan perempuan adalah strategi ekonomi paling efektif untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi sektor pariwisata. Ini adalah investasi yang akan memberikan pengembalian ganda: pemberdayaan perempuan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rekomendasi 4: Melakukan Studi Pemetaan Gender di Sektor Kepemudaan dan Olahraga

- **Tindakan:** Menginisiasi atau bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk melakukan sebuah studi pemetaan awal (*baseline study*) berbasis gender di sektor kepemudaan dan olahraga. Studi ini harus bersifat kualitatif untuk menggali persepsi, hambatan (kultural, sosial, ekonomi), dan pendorong partisipasi bagi pemuda dalam kegiatan kewirausahaan dan olahraga di Kabupaten Bengkayang.

- **Justifikasi:** Saat ini, data di kedua sektor ini hanya bersifat kuantitatif (anggaran dan jumlah kegiatan). Studi ini akan menyediakan data kualitatif yang sangat dibutuhkan untuk memahami "mengapa" di balik angka. Hasil studi akan menjadi landasan berbasis bukti untuk merancang program-program baru yang lebih efektif dan tepat sasaran, yang tidak hanya menghitung jumlah partisipan tetapi juga benar-benar mengatasi akar masalah ketidaksetaraan.